

---

# Ini adalah rumah kami [Ko tō tātou kāinga tēnei]

*Ringkasan laporan dari Komisi Penyelidikan  
Kerajaan terhadap serangan teroris di  
masjidain Christchurch pada tanggal 15  
Maret 2019*

[BAHASA INDONESIA]



ROYAL COMMISSION OF INQUIRY  
INTO THE TERRORIST ATTACK  
ON CHRISTCHURCH MOSQUES  
ON 15 MARCH 2019

TE KŌMIHANA UIUI A TE WHAKAEKE  
KAIWHAKATUMA I NGĀ WHARE  
KŌRANA O ŌTAUTAHI I TE  
15 O POUTŪ-TE-RANGI 2019

26 November 2020

*Ini adalah rumah kami  
[Ko tō tātou kāinga tēnei]*

*Ringkasan laporan dari Komisi Penyelidikan  
Kerajaan terhadap serangan teroris di masjidain  
Christchurch pada tanggal 15 Maret 2019*

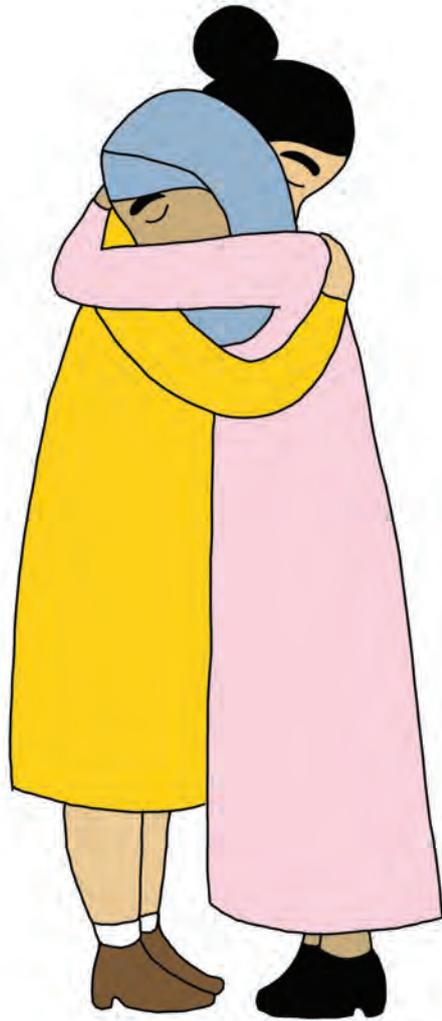
*Diterbitkan 26 November 2020*

*978-0-473-55386-9 (Paperback)  
978-0-473-55387-6 (PDF)*

*(C) Hak cipta 2020*

*Dokumen ini tersedia online di:  
[www.christchurchattack.royalcommission.nz](http://www.christchurchattack.royalcommission.nz)*

*Dicetak menggunakan kertas bersertifikat ECF  
dan FSC yang juga bebas asam dan mudah  
terurai (biodegradable).*



*Ini tempat tinggalmu,  
seharusnya kamu aman  
disini*

*Ilustrasi dan teks ini diberikan dengan hormat oleh seniman Ruby Jones.  
Komisi Kerajaan sangat menghargai bakat dan kemurahan hati Ruby.*

---

# Ucapan Terima Kasih

Komisi Kerajaan berharap untuk menghormati ke 51 korban yang gugur (Syuhada). Merekalah pusat dari penyelidikan kami.

Kami berharap kisah dari 51 syuhada akan tetap ada dan menginspirasi kita serta generasi mendatang.

Komisi Kerajaan juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para penyintas dan saksi.

Kami berharap whānau dari 51 syuhada, penyintas dan saksi dari serangan teroris serta whānau mereka dapat hidup dengan damai.

## **Kia whakatōmuri te haere whakamua**

*Saya melangkah mundur ke masa depan dengan tetap melihat masa lalu.*

Whakataukī atau ‘peribahasa’ ini berbicara kepada perspektif Māori mengenai waktu, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan dipandang saling terkait. Konseptualisasi waktu ini tidak meninggalkan masa lalu; melainkan masa lalu dibawa ke masa depan.

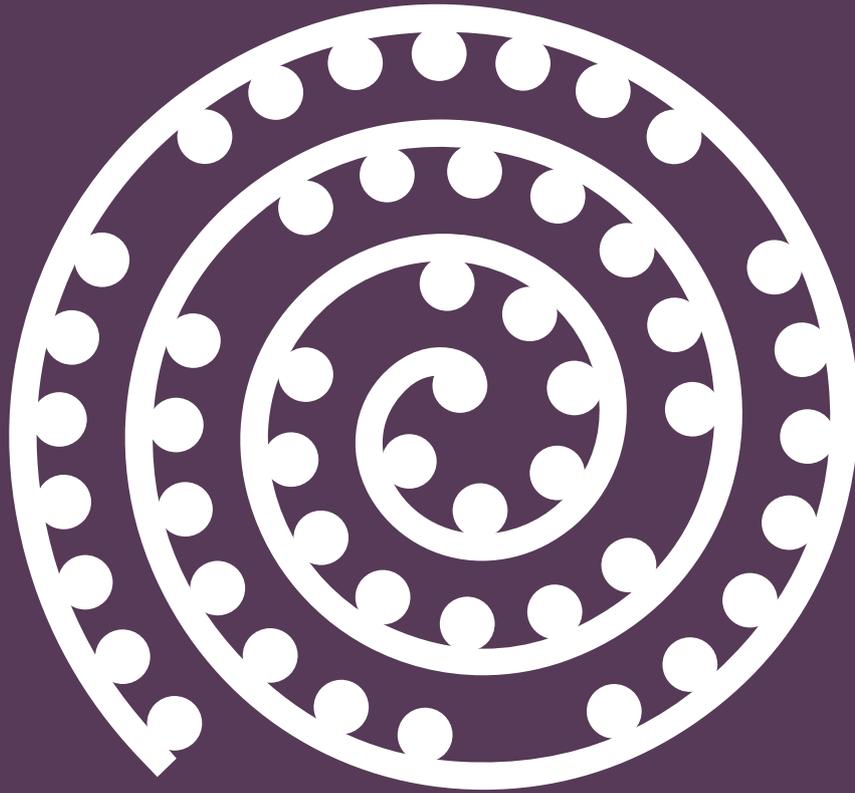


This is our home  
Ko hotau 'api eni  
这是我们的家  
Dies ist unser Zuhause  
یہ رہنے کا گھر ہے  
Bu bizim evimiz  
यह हमारा घर है

Ko tō tātou kāinga tenei

這是我們的家  
এটাই আমাদের বাড়ি  
Nous sommes chez nous ici  
یہ روک پر نومز اد  
Kani waa guriga naga  
O le mātou 'āiga tenei  
یہ ہمارا گھر ہے





**Lambang kami terinspirasi oleh Koru, ikon Aotearoa Selandia Baru yang kekal abadi.**

Daun pakis yang terbentang mewakili kedamaian, ketenangan, pertumbuhan, perubahan positif, dan kebangkitan. Dimensi kedamaian ini juga melekat pada makna kehidupan beriman dalam Islam.

Kami menarik persamaan antara taonga ini dan perjalanan yang akan dialami warga Selandia Baru dimasa datang untuk menjadi masyarakat yang lebih aman dan inklusif.

Rancangan koru dengan tujuh kelompok tujuh daun yang terbentang juga mengakui bahwa 15 Maret 2019, menurut kalender Islam bertepatan dengan 7 Rajab 1440, yaitu hari ke-7 dari bulan ke-7 Islam.

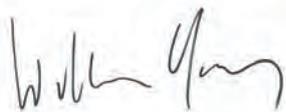
## Kata pengantar



*Assalaamu'alaikum dan tēnā koutou.*

- 1 Kami buka dengan menghargai para whānau dari 51 syuhada, penyintas dan saksi dari serangan teroris 15 Maret 2019 dan whānau mereka yang hidupnya telah berubah selamanya. Mereka yang diserang di masjidain adalah warga Selandia Baru yang sedang beribadah. Tindakan brutalnya sangat menyedihkan dan tidak dapat dimengerti.
- 2 Serangan teroris didorong oleh ideologi Islamofobia sayap kanan yang ekstrim. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kekacauan dan ketidakharmonisan di Selandia Baru. Tujuan ini gagal. Pada hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya, orang-orang Selandia Baru bersatu di sekitar mereka yang terkena dampak dan berbicara menentang rasisme, ekstrimisme, dan kekerasan ekstrimis. Saat itulah timbul renungan nasional mengenai nilai-nilai kebersamaan dan kehidupan kolektif kita, serta apa artinya hidup di Selandia Baru.
- 3 Negara perlu mengetahui apa yang terjadi, mengapa, dan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko serangan di masa depan. Oleh sebab itu, Komisi Penyelidikan Kerajaan ini didirikan. Ini adalah suatu penghargaan dan kehormatan bagi kami untuk dapat bertugas sebagai Anggota.
- 4 Inti dari penyelidikan kami adalah mereka yang telah kehilangan nyawa, whānau dari 51 syuhada, dan penyintas serta saksi dari serangan teroris dan whānau mereka. Kami ingin mendengarkan dan terlibat dengan mereka dengan tata cara budaya yang sesuai.
- 5 Kami merasa rendah hati dengan sambutan ramah yang diberikan saat berada di rumah mereka. Masyarakat berbagi kesedihan dan trauma mereka, serta kecintaan mereka pada Selandia Baru dan keinginan mereka untuk hubungan yang lebih baik antara semua komunitas Selandia Baru. Walaupun kehidupan mereka sudah berbalik, namun mereka masih dapat melihat masa depan dan menaruh harapan untuk Selandia Baru.

- 6 Kami meneliti kehidupan individu yang merencanakan dan melakukan serangan teroris. Kami mengajukan pertanyaan sulit kepada badan sektor Publik, terutama mereka yang bertugas melindungi warga Selandia Baru dari serangan semacam itu.
- 7 Kami bertemu dengan berbagai pakar Selandia Baru dan internasional mengenai topik mulai dari mengumpulkan intelijen hingga kepaduan sosial. Ratusan orang bertemu dengan kami, menulis kepada kami, memberikan bukti dan diwawancarai. Lebih dari 1.100 orang memasukkan pengajuan.
- 8 Kami berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dengan kami secara terbuka dan jujur. Kami merasakan niat yang tulus dan sepenuh hati dalam membantu penyelidikan ini demi keuntungan masa depan semua warga Selandia Baru. Hal ini terutama berlaku bagi anggota Kelompok Referensi Komunitas Muslim yang wawasannya berkontribusi besar pada laporan kami. Demikian pula, kami berterima kasih kepada JustCommunity dan Navigate Your Way Trust, organisasi yang membantu kami untuk terlibat dengan whānau dari 51 shuhada, para penyintas dan saksi dari serangan teroris dan whānau mereka.
- 9 Kami berterima kasih kepada para ahli dan pemimpin internasional dari badan intelijen dan keamanan di Australia, Norwegia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dengan rela memberikan waktu dan keahlian mereka yang berharga. Kami sangat berterima kasih kepada Lord Hogan-Howe QPM dan John McKinnon CNZM QSO yang memberikan keahlian dan wawasan independen yang sangat penting untuk pertanyaan dan laporan ini.
- 10 Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada sekretariat, dan para penasihat yang membantu, Komisi Kerajaan yang membawa pandangan, keterampilan, dan pengalaman mereka yang beragam untuk mendukung pekerjaan kami, memastikan pendekatan yang kuat.
- 11 Kami telah membuat rekomendasi rekomendasi yang sangat luas dan terperinci dalam laporan ini. Inilah yang akan digunakan sebagai dasar agar Selandia Baru menjadi lebih aman dan bersatu.



**Hon Sir William Young KNZM**  
Chair



**Jacqui Caine**  
Member



# Daftar Isi

<b>Ucapan Terima Kasih</b>	2
<b>Kata pengantar</b>	7
<b>Ringkasan eksekutif</b>	10
<b>Temuan terkonsolidasi</b>	20
<b>Ringkasan rekomendasi</b>	22
<b>Catatan akhir</b>	36



## Ringkasan eksekutif

- 1 Sepuluh hari setelah serangan dahsyat pada tanggal 15 Maret 2019, Pemerintah mengumumkan Komisi Penyelidikan Kerajaan, yang umumnya disediakan untuk masalah-masalah yang paling penting bagi publik, akan dibentuk untuk menyelidiki dan melaporkan apa yang telah terjadi.
- 2 Serangan teroris itu dilakukan oleh Brenton Harrison Tarrant, yang telah divonis bersalah melakukan terorisme, pembunuhan 51 orang dan percobaan pembunuhan terhadap 40 orang. Dia sekarang menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kami menyebut dia dalam laporan ini sebagai “individu”. Namanya tidak akan muncul lagi.
- 3 Acuan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengarahkan kami untuk menyelidiki tiga bidang - tindakan individu, tindakan lembaga sektor Publik terkait, dan setiap perubahan yang dapat mencegah serangan teroris semacam itu di masa mendatang. Ini membutuhkan pemeriksaan bukti forensik yang rinci. Hal itu juga mengarahkan kami pada pemikiran luas seputar sistem dan institusi yang dibentuk untuk melindungi dan menghubungkan penduduk Selandia Baru.
- 4 Acuan kami mengharuskan kami untuk membuat temuan mengenai:
  - 4(a) apakah ada informasi yang diberikan atau tersedia untuk badan sektor [Publik] terkait yang dapat memberi tahu mereka mengenai serangan teroris itu dan, jika informasi tersebut diberikan atau tersedia, bagaimana badan tersebut menanggapi informasi semacam itu, dan apakah tanggapan itu sudah sesuai;
  - (b) interaksi antara badan-badan institusi sektor [Publik] yang terkait, termasuk apakah ada kegagalan dalam berbagi informasi antara badan-badan institusi terkait;
  - (c) apakah badan sektor [Publik] yang terkait gagal mengantisipasi untuk menghalau serangan teroris karena konsentrasi sumber daya kontra-terorisme yang tidak tepat atau prioritas pada ancaman terorisme lainnya;
  - (d) apakah ada badan sektor [Publik] yang terkait gagal untuk memenuhi standar yang disyaratkan atau bersalah, baik secara keseluruhan atau sebagian; dan
  - (e) Apakah ada hal-hal lain yang terkait untuk tujuan penyelidikan, sejauh yang diperlukan untuk memberikan laporan yang lengkap.
- 5 Kami melihat empat pertanyaan pertama yang diarahkan terutama pada apakah lembaga sektor Publik bersalah dalam hal-hal yang terkait terhadap serangan teroris.
- 6 Kami juga diminta membuat rekomendasi untuk masa depan.
- 7 Inti dari penyelidikan kami adalah whānau dari 51 shuhada, para penyintas dan saksi dari serangan teroris serta whānau mereka. Menyambung hubungan dengan komunitas Muslim adalah wajar dalam Kerangka Acuan kami, tetapi itu juga sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Dengan cara ini, kami memperoleh wawasan berharga.

- 8 Dari whānau 51 syuhada, dan para penyintas dan saksi serangan teroris dan whānau mereka, kami mendengar mengenai dampak serangan teroris yang berkelanjutan, termasuk tantangan dalam mendapatkan dukungan pemerintah. Melalui keterlibatan yang lebih luas dengan komunitas Muslim, kami belajar mengenai kekesalan dengan sektor Publik yang telah berjalan bertahun-tahun. Komunitas Muslim berbicara terus terang mengenai rasisme, diskriminasi dan pengalaman mereka yang selalu dicurigai, atau diperlakukan sebagai teroris serta ketakutan mereka menjadi sasaran ucapan kebencian, kejahatan kebencian dan terorisme.
- 9 Komunitas yang kami ajak bicara ingin melihat kepaduan sosial yang lebih besar dan menyampaikan pada kami mengenai keinginan mereka memiliki hubungan komunitas yang lebih dekat untuk membantu semua orang merasa aman dan diterima. Kepaduan sosial memiliki manfaat langsung termasuk orang-orang menjalani kehidupan yang bahagia, bermanfaat dan partisipatif, dengan peningkatan produktivitas. Yang penting, ini juga berarti bahwa orang-orang cenderung tidak teradikalisasi terhadap perilaku ekstrimis dan kekerasan, termasuk terorisme.
- 10 Ada kekhawatiran publik yang kuat dikarenakan individu tersebut diberikan lisensi senjata api. Sebagian besar pengajuan yang kami terima berasal dari pemilik senjata api dengan saran untuk memperkuat proses perizinan senjata api, memperkenalkan langkah-langkah untuk melacak pembelian besar senjata api dan amunisi dengan lebih baik, serta kewajiban untuk melaporkan perilaku yang mengkhawatirkan. Banyak yang merasa bahwa melarang senjata api semi-otomatis gaya militer secara tidak langsung menghukum pemilik senjata api yang bertanggung jawab, dan oleh karena itu lebih memilih perbaikan pada sistem perizinan.
- 11 *Bagian 4: Sang teroris* adalah hasil penyelidikan kami yang mendalam terhadap kehidupan individu itu, latar belakangnya dan terutama perancangannya dan persiapannya demi serangan teroris. Kami memahami bahwa ada orang yang lebih suka untuk tidak membacanya, tetapi kami memiliki tanggung jawab untuk melaporkan apa yang telah mempengaruhi pandangan ekstrimnya, mengapa dia memilih Selandia Baru sebagai tempat untuk melakukan aksi serangan terorisnya dan bagaimana dia menghindarkan diri daripada perhatian agensi-agensi sektor Publik.
- 12 Individu tersebut adalah seorang pria berkulit putih berkewarganegaraan Australia yang berusia 28 tahun pada Maret 2019. Ia menampilkan perilaku rasis sejak usia muda. Pengalaman hidupnya tampaknya telah memicu kebencian dan dia menjadi radikal, membentuk pandangan sayap kanan yang ekstrim mengenai orang-orang yang dia anggap sebagai ancaman. Yang akhirnya, berubah menjadi kekerasan.
- 13 Individu tersebut tiba di Selandia Baru pada tanggal 17 Agustus 2017. Sebagai warga Australia, ia berhak tinggal di Selandia Baru. Dalam beberapa hari setelah kedatangannya, dia pindah ke Dunedin dan sejak saat ini, hidupnya sebagian besar dikhususkan untuk perencanaan dan persiapan untuk serangan teroris. Kami melihat penggunaan platform

online sebelum dan selama serangan teroris. Kami juga memeriksa bagaimana individu memperoleh lisensi senjata api dan bagaimana dia kemudian secara legal dapat memperoleh senjata api dan amunisi. Kami melacak bagaimana dia berlatih untuk serangan teroris dengan mengembangkan keahlian senjata api dan berolahraga di gym dan menggunakan steroid untuk meningkatkannya.

- 14 Individu tersebut tidak memiliki teman dekat dan sebagian besar menghindari situasi sosial dan, dalam pengertian itu, dia terisolasi secara sosial. Dia mandiri secara finansial dan banyak bepergian. Dalam persiapan dan perencanaan serangan terorisnya, dia metedis dan berpikiran tunggal. Individu dapat bertampilan baik dan berperilaku dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan. Dia tidak diidentifikasi sebagai seseorang yang menimbulkan ancaman. Kami memperluas alasannya dalam laporan.
- 15 Seperti yang kami jelaskan secara rinci di *Bagian 4: Sang teroris*, kami puas bahwa individu bertindak sendiri.
- 16 Kami mencermati senjata api di *Bagian 5: Lisensi senjata api*.
- 17 Meskipun individu tersebut hampir tidak memiliki sejarah di Selandia Baru, namun permohonan lisensi senjata apinya disetujui dalam waktu sekitar tiga bulan setelah kedatangannya di negara tersebut. Dia telah menunjuk saudara perempuannya sebagai pemberi referensi, tetapi karena dia tinggal di Australia, staf perizinan senjata api meminta pemberi referensi diganti. Pada akhirnya, dua pemberi referensi yang berbasis di Selandia Baru (seorang dewasa dan orang tua mereka) digambarkan sebagai “teman” individu, menjamin dia sebagai orang yang “sehat dan pantas”. Orang dewasa (yang kami sebut sebagai “teman pemain game”) telah bermain game online dengan individu tersebut selama sepuluh tahun, tetapi secara fisik mengenalnya hanya sekitar 21 hari dalam satu dasawarsa itu. Orang tua teman main game hanya menghabiskan waktu sekitar tujuh hari dengan individu tersebut selama empat tahun. Dalam kedua kasus tersebut, waktu yang dihabiskan dengan individu bersifat sporadis.
- 18 Kami menyimpulkan bahwa selama proses aplikasi lisensi senjata api, perhatian yang diberikan tidak mencukupi untuk mengetahui apakah teman main game dan orang tua mereka cukup mengenal individu tersebut untuk menjadi menjadi sumber referensi yang sesuai. Kami membahas apa yang mungkin terjadi jika aplikasi tidak disetujui pada saat itu atau mungkin ditangani secara berbeda.
- 19 Kami menemukan bahwa administrasi sistem perizinan senjata api Kepolisian Selandia Baru tidak memenuhi standar yang disyaratkan. Alasannya termasuk kurangnya panduan dan pelatihan untuk staf perizinan serta panduan yang tidak lengkap untuk menangani aplikasi di mana para sumber referensi yang dinominasikan tidak dapat diwawancarai secara langsung.

- 20 Untuk kebutuhan kontekstual, karena perubahan undang-undang senjata api tidak termasuk dalam cakupan kami, maka kami membahas regulasi senjata api semi-otomatis. Regulasi ini lemah, mudah dieksploitasi dan dimainkan oleh individu. Risiko bahwa senjata yang sangat mematikan dapat digunakan dalam serangan teroris di Selandia Baru telah dikenali dalam beberapa kesempatan. Ada suatu peringatan menyusul serangan teroris yang dilakukan di Oslo dan di Pulau Utøya di Norwegia pada tahun 2011, di mana senapan semi-otomatis digunakan.
- 21 Kami memeriksa secara rinci apa yang diketahui oleh lembaga sektor Publik mengenai individu sebelum serangan teroris di *Bagian 6: Apa yang diketahui oleh lembaga sektor Publik mengenai teroris*. Kami mengajukan pertanyaan rinci kepada 217 lembaga di sektor Publik yang lebih luas dan kami puas dengan hasil penemuan bahwa sepuluh dari lembaga tersebut memiliki informasi yang terkait dengan individu.
- 22 Satu-satunya informasi yang secara langsung merujuk pada serangan teroris adalah email yang dikirim individu ke Layanan Parlemen (serta politisi, outlet media, dan jurnalis perorangan) hanya delapan menit sebelum serangan teroris dimulai. Informasi penting mengenai serangan itu (dalam hal lokasi) berada dalam manifesto 74 halaman yang dilampirkan dan ditautkan dalam email. Butuh beberapa menit bagi Layanan Parlemen untuk membuka email tersebut, membaca dan memahami manifesto dan kemudian meneruskan detailnya ke Kepolisian Selandia Baru. Saat itu serangan teroris baru saja dimulai. Kami menjelajahi secara rinci di *Bagian 6: Apa yang diketahui oleh badan-badan sektor Publik mengenai teroris* dan kami puas bahwa Layanan Parlemen mengikuti prosedur yang benar dan bertindak segera.
- 23 Informasi lain yang diketahui mengenai individu tersebut sebagian besar biasa-biasa saja. Bila ditinjau balik, kita dapat melihat bahwa beberapa memang berhubungan dengan perencanaan dan persiapan individu. Namun, hal itu tidak terlihat pada saat itu karena informasi ini terpisah-pisah. Tidak ada satu aspek pun yang dapat memperingatkan badan-badan sektor Publik mengenai serangan teroris yang akan datang. Badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme tidak dibentuk untuk mengumpulkan informasi seperti catatan perizinan medis dan senjata api. Kami membahas ini di *Bagian 6: Apa yang diketahui lembaga sektor Publik mengenai teroris*.
- 24 Di *Bagian 7: Mendeteksi potensi teroris*, kami membahas kendala dalam mendeteksi dan menggagalkan teroris. Serangan teroris oleh pelaku tunggal sulit untuk dideteksi dan dihentikan oleh badan penegak hukum dan intelijen. Meskipun demikian, banyak serangan teroris tunggal yang sebenarnya berhasil digagalkan. Dalam bagian ini kami menggunakan individu sebagai studi kasus untuk menguji dan menjelaskan peranan beberapa masalah sebelum kami melanjutkan untuk melihat lebih dekat cara dalam melawan terorisme.

- 25 Upaya kontra-terorisme (yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang lebih luas) ditinjau pada *Bagian 8: Menilai upaya kontra-terorisme*. Badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme termasuk Kelompok Keamanan Nasional dari Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah, Imigrasi Selandia Baru, Layanan Bea Cukai Selandia Baru, Polisi Selandia Baru dan layanan Intelijen Keamanan Selandia Baru.
- 26 Pertanyaan paling tajam yang telah kami ajukan untuk menjawab mengenai upaya kontra-terorisme adalah apakah lembaga sektor Publik terkait gagal mengantisipasi atau merencanakan serangan teroris karena konsentrasi sumber daya kontra-terorisme yang tidak tepat atau prioritas pada ancaman terorisme lainnya. Pertanyaan ini bukanlah hal mudah untuk dijawab, tetapi kami mengatasi masalah tersebut secara metodis.
- 27 Ada konteks yang harus dikenali. Badan intelijen dan keamanan memiliki izin sosial yang relatif sedikit. Untuk alasan ini dan alasan lain yang kami jelajahi, badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas - jauh lebih sedikit daripada yang diyakini banyak orang. Gagasan bahwa badan intelijen dan keamanan terlibat dalam pengawasan massal terhadap warga Selandia Baru adalah mitos. Melihat kembali ke tahun 2014, badan intelijen dan keamanan berada dalam kondisi yang rapuh. Latihan pembangunan kembali baru dilakukan pada pertengahan 2016 dan masih belum selesai ketika serangan teroris terjadi pada 2019.
- 28 Penilaian kami berfokus terutama pada periode antara 2016 dan 15 Maret 2019. Selama jangka waktu tersebut, yang utama, namun tidak eksklusif, sumber daya kontra-terorisme tertuju pada apa yang dilihat sebagai ancaman dari terorisme ekstrimis Islam. Penting untuk dicatat bahwa badan-badan anti-terorisme memang menindak lanjuti arahan terkait kemungkinan terorisme ekstrimis sayap kanan. Jadi, konsentrasi pada ancaman terorisme ekstrimis Islam tidak mengabaikan penanganan petunjuk lain ketika mereka muncul.
- 29 Pada tahun 2016, Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru mengidentifikasi bahwa penetapan gambaran garis dasar (pemahaman) mengenai ancaman terorisme lainnya yang baru muncul sebagai suatu tujuan, tetapi hanya akan dikejar jika mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya. Pekerjaan ini akhirnya dimulai pada Mei 2018, dengan salah satu proyek yang difokuskan pada pengembangan pemahaman mengenai ekstrimisme sayap kanan di Selandia Baru. Pada saat itu, Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru hanya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ekstrimisme sayap kanan dan kerja ini belum lengkap ketika serangan teroris terjadi.
- 30 Fungsi intelijen dari Kepolisian Selandia Baru mengalami penurunan dan sejak tahun 2015 tidak melakukan penilaian strategis terkait ancaman terorisme.

- 31 Kami menyimpulkan bahwa terdapat konsentrasi sumber daya kontra-terorisme yang tidak tepat terhadap ancaman terorisme ekstrimis Islam, tetapi diperlukan suatu cara untuk mengetahui alasannya.
- 32 Kekhawatiran kami dengan adanya fokus sumber daya kontra-terorisme pada terorisme Islam adalah salah satu proses. Ada dua aspek untuk ini. Pertama, belum ada penilaian yang substansial mengenai potensi ancaman terorisme lainnya. Jadi, pemusatan sumber daya kontra terorisme tidak didasarkan pada analisa risiko perbandingan. Kedua, tidak ada keputusan di seluruh sistem yang diinformasikan untuk melanjutkan atas dasar ini. Yang kami maksud adalah keputusan yang dibuat oleh semua lembaga sektor Publik terkait dengan pengetahuan bahwa ada potensi ancaman terorisme lainnya yang belum dipahami dengan baik. Ini juga membutuhkan penjelasan singkat.
- 33 Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru telah memutuskan untuk memusatkan sumber daya kontra-terorisme yang langka pada ancaman terorisme ekstrimis Islam. Ini sebagian karena kurangnya kapasitas hingga pertengahan 2018 untuk menghadapi ancaman itu dan, pada saat yang sama, untuk membuat data dasar ancaman lainnya. Badan sektor Publik lainnya yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme tidak terlibat dalam diskusi informasi mengenai pendekatan ini beserta implikasinya, termasuk risiko risiko yang tidak dapat dikurangi. Berdasarkan hal ini, tidak ada pemberitahuan dan keputusan seluruh sistem untuk tindak kelanjutannya, yang mana kami anggap tidak layak.
- 34 Berdasarkan semua, kami menemukan bahwa konsentrasi sumber daya pada ancaman terorisme ekstrimis Islam bukanlah alasan mengapa perencanaan dan persiapan individu untuk serangan teroris tidak terdeteksi. Mengingat keamanan operasional yang dijaga individu, lingkungan otorisasi legislatif di mana upaya kontra-terorisme beroperasi dan kemampuan dan kapasitas terbatas dari badan-badan anti-terorisme, tidak ada cara yang masuk akal untuk dapat dideteksi kecuali secara kebetulan. Terlepas dari kekhawatiran yang baru saja kita diskusikan dan masalah sistemik lainnya yang telah kita ulas di *Bagian 8: Menilai upaya kontra-terorisme*, fakta bahwa individu tidak terdeteksi bukanlah kegagalan intelijen.
- 35 Kami telah melihat lebih luas pada upaya kontra-terorisme. Kami telah menyebutkan izin sosial, kemampuan dan kapasitas yang terbatas. Pada pertengahan dasawarsa terakhir, topik kontra-terorisme dan intelijen dan keamanan telah menjadi racun politik dan umum. Hanya sedikit kepemilikan politik. Kepemimpinan sektor Publik terfrakmentasi melalui sistem keamanan nasional yang terdesentralisasi dengan badan-badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme bertindak dengan cara-cara yang hanya terkoordinasi secara longgar.

- 36 Seperti yang telah dibahas, pembangunan kembali kapasitas dan kapabilitas badan intelijen dan keamanan dimulai pada pertengahan 2016. Meskipun kemajuan telah dicapai, namun secara signifikan, masih lebih banyak yang dibutuhkan. Selain itu, diperlukan perubahan sistemik, termasuk pembentukan badan intelijen dan keamanan nasional. Ini akan menghasilkan pendekatan yang lebih sistematis untuk melawan terorisme dan upaya melawan kekerasan ekstrimisme. Kepala eksekutif dari badan baru tersebut akan menjadi penasihat nasional untuk intelijen dan keamanan, dimana badan tersebut akan unggul karena hanya berfokus pada masalah intelijen dan keamanan. Ini akan memberikan nasihat kebijakan strategis yang komprehensif, mengembangkan strategi kontra-terorisme dan mengatur undang-undang keamanan nasional yang berkaitan. Badan tersebut akan memikul tanggung jawab untuk pengembangan penilaian intelijen, didukung oleh pemindaian cakrawala, dan bertanggung jawab atas desain kerangka kerja manajemen kinerja dan memantau kemajuannya.
- 37 Kami mengakui bahwa meskipun fokus kami adalah pada upaya kontra-terorisme, rekomendasi utama kami adalah untuk perubahan seluruh sistem yang berkaitan dengan semua ancaman dan masalah intelijen. Tidak praktis untuk mengukir tanggung jawab kontra-terorisme.
- 38 Ini dan rekomendasi rinci lainnya diatur di *Bagian 10: Rekomendasi*.
- 39 Implementasi penuh dari rekomendasi kami akan menghasilkan upaya penanggulangan terorisme yang lebih terorganisir dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta kerangka legislatif yang lebih longgar. Kami berharap untuk melihat lebih banyak keterlibatan politik dan publik serta diskusi dan pengawasan yang lebih kuat. Ini akan menghasilkan kepercayaan publik yang lebih besar dan juga lisensi sosial. Kami ingin diskusi mengenai kontra-terorisme dinormalisasi. Rekomendasi kami memberikan sebuah mekanisme agar hal ini berjalan.
- 40 Tidak adanya diskusi semacam itu hingga saat ini telah membawa konsekuensi.
- 41 Sejak 2015, pemerintah berturut-turut enggan melanjutkan strategi kontra-terorisme yang dihadapi publik. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari stigmatisasi lebih lanjut pada komunitas Muslim. Namun, jika strategi seperti itu dibagikan kepada publik dan juga memasukkan kebijakan “lihat sesuatu, katakan sesuatu”, ada kemungkinan bahwa aspek perencanaan dan persiapan individu mungkin telah dilaporkan ke lembaga anti-terorisme. Bila ditinjau balik, pelaporan semacam itu akan memberikan peluang terbaik untuk menggagalkan serangan teroris. Strategi kontra-terorisme yang dihadapi publik kemungkinan juga akan memasukkan kebijakan untuk membuat tempat-tempat ramai lebih aman dan untuk melindungi kemungkinan target dari serangan. Penerapan kebijakan semacam itu mungkin dapat mengurangi korban jiwa pada 15 Maret 2019. Selain itu, bila diketahui risiko

seorang teroris dalam mengambil kesempatan dari peraturan longgar senjata semi-otomatis Selandia Baru telah diatasi sebelumnya, kemungkinan besar tidak akan ada serangan teroris pada 15 Maret 2019.

- 42 Rangkaian terakhir masalah yang kami pertimbangkan adalah bagaimana kepaduan sosial, inklusi, dan keragaman telah didekati di Selandia Baru pada *Bagian 9: Kepaduan sosial dan merangkul keragaman*.
- 43 Kepaduan sosial, inklusi, dan keragaman tidak ada dalam rencana kerja awal kami. Namun, seiring dengan berkembangnya penyelidikan kami dan semakin dalamnya keterlibatan kami dengan komunitas, jelaslah bahwa masalah ini juga memerlukan pertimbangan. Kepaduan sosial memiliki banyak manfaat langsung bagi individu dan komunitas. Sebaliknya, masyarakat yang terpolarisasi di sekitar perbedaan politik, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, etnis atau agama akan lebih cenderung melihat ideologi radikal berkembang subur. Upaya untuk membangun kepaduan sosial, inklusi, dan keragaman dapat berkontribusi untuk mencegah atau melawan ekstrimisme. Selain itu, memiliki masyarakat yang kohesif, inklusif, dan merangkul keberagaman adalah hal yang baik.
- 44 Kami mempertimbangkan bagaimana lembaga sektor Publik, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil dan komunitas harus dapat mendukung masyarakat yang lebih kohesif. Upaya sektor Publik telah terfragmentasi dan membuat frustrasi kelompok masyarakat yang terlibat dengan mereka. Percakapan publik mengenai kepaduan sosial tidak ada. Sekali lagi, kami menyimpulkan bahwa perubahan sistemik diperlukan dan kami menguraikan pemikiran kami di *Bagian 10: Rekomendasi*.
- 45 Laporan ini berisi 44 rekomendasi yang mencakup lima bidang utama yang berkaitan dengan upaya kontra-terorisme, sistem perizinan senjata api, kebutuhan berkelanjutan dari mereka yang paling terkena dampak serangan teroris, tanggapan Selandia Baru terhadap populasi kita yang semakin beragam dan penerapan rekomendasi kami. Hal ini dijelaskan secara rinci di *Bagian 10: Rekomendasi*.
- 46 Ada beberapa tema dan masalah yang berulang kali sangat membebani saat kami mempertimbangkan rekomendasi ini. Yang paling penting dari ini adalah kebutuhan untuk menghadapi dan terlibat secara terbuka mengenai masalah sulit. Dalam penyelidikan kami, kami telah melihat aktivitas sektor Publik yang melibatkan sistem perizinan senjata api, upaya kontra-terorisme, dan kohesi sosial serta merangkul keberagaman. Masing-masing memiliki ciri kepemilikan politik yang terbatas dan tidak adanya diskusi publik.

- 47 Kelonggaran kontrol pada senjata api semi-otomatis telah dihargai selama beberapa dasawarsa dan risiko bahwa teroris dapat mengambil keuntungan dari hal ini telah diidentifikasi sejak tahun 2011. Tetapi tidak ada pengetatan rezim yang signifikan dikarenakan oleh perlawanan yang kuat dari komunitas pro-senjata api.
- 48 Kontroversi media dan umumnya rendahnya tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat umum pada badan intelijen dan keamanan serta aspek kerja lembaga penegak hukum, yang berarti bahwa politisi telah menghindari tantangan keterlibatan masyarakat umum mengenai pemberantasan terorisme.
- 49 Membangun kepaduan sosial, inklusi, dan merangkul keberagaman adalah tujuan yang kita semua cita-citakan. Dalam respons COVID-19 dan lingkungan pemulihan di mana ada peningkatan stres, meningkatnya masalah kesehatan mental dan kecanduan dan kemerosotan ekonomi, potensi ketidaksetaraan dan kerentanan diperbesar. Saat negara melihat ke depan, ada peluang untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur sosial dan ketahanan masyarakat kita dengan cara yang sama seperti infrastruktur fisik diinvestasikan. Ada alasan kuat untuk tindakan lintas-pemerintah lebih lanjut untuk meningkatkan kohesi sosial dan bagaimana kita merangkul perbedaan.
- 50 Kami sadar bahwa keterlibatan politik dalam masalah ini tidak akan mudah. Tetapi menghadapi masalah yang sulit dan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat sangatlah penting. Kami telah membahas konsekuensi dari tidak mempromosikan strategi kontra-terorisme yang dihadapi masyarakat umum dan tidak memperketat kontrol yang longgar pada senjata api sebelum serangan teroris. Kami berharap laporan kami akan mendorong anggota masyarakat, pejabat, dan politisi untuk terlibat dalam debat yang jujur sehingga semua orang memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga Selandia Baru tetap aman, terjamin, dan kohesif. Ada dorongan untuk berdebat mengenai negara seperti apa yang diinginkan Selandia Baru.
- 51 Terakhir, Selandia Baru tidak akan pernah kebal dari kekerasan ekstrimisme dan terorisme. Bahkan dengan sistem terbaik di dunia, seorang calon teroris yang bertekad keras, akan tetap dapat melakukan serangan di Selandia Baru pada masa mendatang. Tetapi banyak yang dapat dilakukan pemerintah, dimulai dengan komitmen yang lebih besar terhadap transparansi dan keterbukaan dengan warga Selandia Baru. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam membangun kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai yang kita bagi dan ingin dijunjung sebagai masyarakat dan bagi generasi masa depan kita.



# Temuan terkonsolidasi

1 Landasan Acuan kami mengharuskan kami untuk membuat temuan mengenai:

- 4(a) apakah ada informasi yang diberikan atau tersedia untuk lembaga sektor [Publik] yang terkait yang dapat atau seharusnya dapat memperingatkan mereka mengenai serangan teroris dan, jika informasi tersebut diberikan atau tersedia, bagaimana lembaga menanggapi informasi semacam itu, dan apakah tanggapan tersebut tepat; dan
- (b) interaksi antara lembaga sektor [Publik] yang terkait termasuk apakah ada kegagalan dalam berbagi informasi antara lembaga terkait; dan
- (c) apakah lembaga sektor [Publik] yang terkait gagal mengantisipasi atau merencanakan pencegahan dari serangan teroris karena konsentrasi sumber daya kontra-terorisme yang tidak tepat atau prioritas pada ancaman terorisme lainnya; dan
- (d) apakah ada lembaga sektor [Publik] yang terkait gagal memenuhi standar yang disyaratkan atau bersalah, baik secara keseluruhan atau sebagian; dan
- (e) apakah ada hal-hal lain yang berhubungan dengan tujuan penyelidikan, sejauh yang diperlukan untuk memberikan laporan yang lengkap.

## Apa yang diketahui oleh badan sektor Publik mengenai sang teroris

2 *Bagian 6: Apa yang diketahui oleh badan-badan sektor Publik mengenai sang teroris* dapat menjelaskan bukti dan alasan dari temuan kami.

3 “Serangan sang teroris” adalah sebuah serangan teroris yang dilakukan oleh individu sesuai dengan perencanaan dan persiapannya selama beberapa tahun sebelumnya.

4 **Kami menemukan bahwa:**

- a) satu-satunya informasi mengenai individu yang diketahui oleh lembaga sektor Publik Selandia Baru sebelum 15 Maret 2019 yang dapat atau seharusnya memberi peringatan kepada mereka mengenai serangan teroris adalah sebuah email yang dikirim oleh individu tersebut ke Layanan Parlemen;
- b) Layanan Parlemen bertindak dengan semestinya dalam jangka waktu yang wajar dalam keadaan menanggapi email yang dikirim tepat sebelum serangan teroris;
- c) tidak ada informasi lain yang diberikan atau tersedia untuk badan sektor Publik terkait yang dapat atau seharusnya memberi peringatan kepada mereka mengenai serangan sang teroris; dan
- d) tidak ada kegagalan dalam berbagi informasi antara badan-badan sektor Publik yang terkait.

## Menilai upaya kontra-terorisme

- 5 *Bagian 8: Menilai usaha-usaha dalam melawan terorisme* menetapkan bukti dan alasan penemuan kami.
- 6 Kami menyimpulkan bahwa konsentrasi sumber-sumber kontra terorisme terhadap ancaman keganasan ekstrimis Islam sebelum proyek data dasar Pelayanan Intelijen Keamanan Selandia Baru yang dimulai pada tahun 2018 tidak sesuai karena.
- a) tidak berdasarkan penilaian yang tepat mengenai ancaman terorisme yang berkaitan dengan ideologi lain; dan
  - b) bukan hasil dari keputusan keseluruhan sistem, yang mana walaupun tidak adanya penilaian tersebut, sumber-sumber kontra terorisme harus terus diperuntukkan hampir secara eksklusif bagi ancaman terorisme ekstrimis Islam.
- 7 **Kami mendapati bahwa:**
- a) konsentrasi sumber daya yang tidak tepat pada ancaman terorisme ekstrimis Islam tidak berkontribusi pada perencanaan dan persiapan individu agar serangan terorisnya tidak terdeteksi. Dan untuk itu, Badan-badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme tidak gagal dalam mengantisipasi atau perencanaan serangan teroris, dikarenakan konsentrasi sumber daya kontra-terorisme yang tidak tepat.
  - b) tidak ada badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme gagal memenuhi standar yang disyaratkan atau melakukan kesalahan dalam hal-hal yang penting bagi perencanaan dan persiapan individu agar serangan terorisnya tidak terdeteksi.

## Lisensi senjata api

- 8 *Bagian 5: Lisensi senjata api* menjelaskan bukti dan alasan untuk temuan kami.
- 9 **Kami menemukan bahwa:**
- a) Polisi Selandia Baru gagal memenuhi standar yang disyaratkan dalam administrasi sistem perizinan senjata api karena:
    - i) Panduan Senjata, Panduan Pemeriksaan Ahli dan Panduan Pemeriksaan Lisensi Senjata Api tidak memberikan panduan yang koheren dan lengkap mengenai proses aplikasi di mana pemohon tidak dapat menyediakan seorang sumber referensi kerabat dekat yang dapat diwawancarai secara langsung;
    - ii) Polisi Selandia Baru tidak membuat pengaturan untuk memastikan bahwa staf perizinan senjata api menerima pelatihan sistematis dan tinjauan rutin terhadap praktek mereka; dan
    - iii) dalam menangani permohonan lisensi senjata api individu, Kepolisian Selandia Baru tidak memadai menangani masalah apakah teman bermain game dan orang tua mereka cukup mengenal individu tersebut untuk menjadi sumber referensi.

## Ringkasan rekomendasi

- 1 Landasan Acuan kami mengarahkan kami untuk membuat rekomendasi yang kami anggap tepat sebagai berikut:

- 5(1)(a) apakah ada peningkatan pada pengumpulan informasi, berbagi, dan praktek analisis oleh lembaga sektor [Publik] terkait yang dapat mencegah serangan teroris, atau dapat mencegah serangan teroris semacam itu di masa depan, termasuk dan tidak terbatas pada, ketepatan waktu, kecukupan, efektivitas, dan koordinasi pengungkapan informasi, berbagi, atau pencocokan antara badan sektor [Publik] terkait; dan
  - (b) perubahan apa, jika ada, yang harus diterapkan untuk meningkatkan sistem lembaga sektor [Publik] terkait, atau praktek operasional, untuk memastikan pencegahan serangan teroris seperti itu di masa depan; dan
  - (c) hal-hal berhubungan lain yang mengacu pada poin-poin diatas, sejauh yang diperlukan untuk memberikan laporan yang lengkap.

- 2 Rekomendasi kami dijabarkan di *Bagian 10: Rekomendasi* dan membahas bidang-bidang berikut ini:

- a) meningkatkan upaya kontra-terorisme di Selandia Baru;
- b) meningkatkan sistem perizinan senjata api Selandia Baru;
- c) mendukung kebutuhan pemulihan yang sedang berlangsung untuk whānau, penyintas dan saksi yang terkena dampak dari serangan teroris 15 Maret 2019;
- d) meningkatkan tanggapan Selandia Baru terhadap populasi kita yang semakin beragam; dan
- e) implementasi dari rekomendasi

- 3 Rekomendasi tersebut juga diatur dalam empat tema:

- 4 **Kepemimpinan dan arahan pemerintah yang kuat diperlukan** untuk memberikan pengawasan dan akuntabilitas yang efektif terhadap upaya kontra-terorisme. Ini akan memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dipahami dengan baik di seluruh Pengurangan, Kesiapan, Respon dan Pemulihan di tingkat nasional, regional dan lokal serta sumber daya difokuskan dengan tepat.
- 5 Kepemimpinan dan arahan pemerintah yang kuat juga diperlukan dalam memposisikan Selandia Baru (dan khususnya sektor Publik) untuk menanggapi dan beradaptasi dengan populasi Selandia Baru yang semakin beragam dan untuk mempengaruhi perubahan sosial yang seiring waktu akan membantu mencapai Selandia Baru yang aman dan inklusif.
- 6 **Pengambilan keputusan pemerintah yang terlibat dan bertanggung jawab** akan memungkinkan kebijakan, program, dan layanan sektor Publik dirancang dan dijalankan dengan memenuhi persyaratan masyarakat Selandia Baru yang semakin beragam. Sektor Publik (dan khususnya lembaga yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme) perlu mengubah

cara mereka terlibat dengan komunitas. Pola pikir sektor Publik harus bergeser untuk menghargai masukan komunitas menjadi keputusan, transparansi, dan terlibat dalam debat yang kuat.

- 7 **Setiap orang dalam masyarakat memiliki peran dalam membuat Selandia Baru aman dan inklusif**, tetapi tidak ada pemahaman yang sama mengenai apa peran mereka, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan apa yang harus mereka capai. Kejelasan peran dan tanggung jawab adalah sangat penting.
- 8 Untuk memastikan bahwa setiap orang menyadari peran mereka dalam membuat Selandia Baru aman dan inklusif, pemerintah (dan badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme) harus memastikan bahwa upaya kontra-terorisme Selandia Baru untuk melindungi, dihargai oleh rakyatnya. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap upaya kontra-terorisme Selandia Baru akan membutuhkan waktu, jadi upaya untuk melakukannya harus segera dimulai. Selain itu, pemerintah harus memahami arti perubahan demografi Selandia Baru bagi Selandia Baru sebagai perhimpunan masyarakat dan memperkenalkan pesan yang konsisten mengenai manfaat keanekaragaman dan masyarakat yang inklusif.
- 9 Mendasari semua ini, **Selandia Baru membutuhkan hukum dan kebijakan yang sesuai untuk tujuan tertentu**. Hal ini mencakup pemastian bahwa Undang-Undang Intelijen dan Keamanan 2017 dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme 2002 sesuai dengan tujuan, menyediakan pelanggaran-pelanggaran kejahatan kebencian, menciptakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk ujaran kebencian dan mendorong pencatatan yang lebih baik atas laporan kejahatan rasial. Yang juga penting adalah kebutuhan Kepolisian Selandia Baru untuk meningkatkan administrasi sistem perizinan senjata api.

## Rekomendasi untuk meningkatkan upaya kontra-terorisme di Selandia Baru

### Kami merekomendasikan agar Pemerintah:

1. **Memastikan** seorang menteri diberi tanggung jawab dan akuntabilitas untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan terorisme.
2. **Membentuk** badan intelijen dan keamanan nasional yang baru serta memiliki sumber daya yang baik dan diberi mandat secara legislatif untuk bertanggung jawab atas fungsi intelijen strategis dan kepemimpinan keamanan termasuk:
  - a) seorang kepala eksekutif yang ditunjuk sebagai penasihat intelijen dan keamanan untuk perdana menteri, Kabinet, memimpin Dewan Keamanan dan Intelijen atau badan pemerintahan baru yang berpotensi (Rekomendasi 3);
  - b) beroperasi sebagai pemimpin sektor dan koordinator untuk strategi intelijen dan masalah keamanan;
  - c) mengembangkan strategi kontra-terorisme yang mencakup melawan kekerasan ekstrimisme (Rekomendasi 4);
  - d) memberikan nasihat kebijakan strategis kepada menteri yang bertanggung jawab mengenai masalah intelijen dan keamanan;
  - e) penilaian intelijen dan pemindaian pandangan yang didukung oleh tenaga yang sangat ahli;
  - f) memimpin keterlibatan dengan komunitas, masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam isu intelijen dan keamanan strategis;
  - g) memastikan upaya kontra-terorisme sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia domestik dan internasional Selandia Baru;
  - h) memanfaatkan struktur manajemen darurat di tingkat lokal dan regional;
  - i) pemantauan dan pelaporan kinerja sistem; dan
  - j) akuntabilitas kepada menteri atas kinerja dalam penanggulangan terorisme (Rekomendasi 1).

- 3. Menyelidiki** mekanisme alternatif secara sukarela dari Badan Keamanan dan Intelijen termasuk pembentukan Badan Eksekutif Antar Departemen sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pelayanan Publik 2020 yang antara lain:
- a) menelaraskan dan mengoordinasikan pekerjaan, perencanaan dan anggaran di seluruh badan sektor Publik yang terkait dan menangani semua masalah intelijen dan keamanan;
  - b) melaporkan kepada Kabinet Hubungan Eksternal dan Komite Keamanan, termasuk risiko dan ancaman saat ini dan yang bermunculan, setiap tiga bulan;
  - c) dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan terorisme:
    - i) merekomendasikan kepada Kabinet, pengembangan strategi oleh badan intelijen dan keamanan nasional (Rekomendasi 4) dalam menangani ekstrimisme dan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi ancaman kekerasan ekstrimisme dan terorisme pada saat ini dan yang mulai bermunculan; dan
    - ii) memastikan kegiatan penerapan strategi dalam mengatasi ekstrimisme dan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi ancaman kekerasan ekstrimisme dan terorisme saat ini dan yang mulai bermunculan dapat diidentifikasi, dikoordinasi, dan dipantau.
- 4. Mengembangkan dan menerapkan** strategi menghadapi publik dalam membahasekstrimisme dan untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman kekerasan ekstrimisme dan terorisme pada saat ini dan yang mulai bermunculan:
- a) dipimpin oleh badan intelijen dan keamanan nasional yang baru (Rekomendasi 2);
  - b) dikembangkan dengan bekerja sama bersama komunitas, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor swasta;
  - c) menetapkan tujuan dan arah strategi, dengan sasaran, pencapaian, dan ukuran kinerja;
  - d) menetapkan prioritas untuk upaya kontra-terorisme di seluruh Pengurangan, Kesiapan, Tanggap, dan Pemulihan;
  - e) mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk lembaga sektor Publik, komunitas, masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menerapkan strategi di seluruh Pengurangan, Kesiapan, Respon dan Pemulihan;
  - f) memiliki pengawasan dari menteri yang bertanggung jawab (Rekomendasi 1); dan
  - g) ditinjau dalam tiga tahun setelah publikasi bekerja sama dengan badan-badan sektor Publik, komunitas, masyarakat sipil, pemerintah daerah, sektor swasta dan Kelompok Penasehat untuk penanggulangan-Terrorisme (Rekomendasi 7).

5. **Mengubah** Undang-Undang Keuangan Publik 1989 yang mewajibkan badan intelijen dan keamanan untuk memberikan informasi kinerja yang dapat menjadi subjek audit kinerja oleh Auditor-Jenderal.
6. **Memperkuat** peran Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen sehingga dapat memberikan pengawasan lintas parlemen yang lebih baik dan terinformasi terhadap sistem keamanan nasional termasuk upaya kontra-terorisme dan penetapan prioritas dan juga untuk anggota agar dapat mengakses informasi sensitif yang diperlukan untuk pengawasan.
7. **Mengarahkan** kepala eksekutif badan intelijen dan keamanan nasional yang baru (Rekomendasi 2) untuk membentuk Kelompok Penasehat yang bertujuan untuk penanggulangan terorisme:
  - a) bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada badan intelijen dan keamanan nasional, Dewan Keamanan dan Intelijen atau penggantinya (Rekomendasi 2 dan 3); dan
  - b) dengan fungsi yang akan ditetapkan, dalam undang-undang secepat mungkin, tetapi tanpa menunda pembentukannya.
8. **Mengarahkan** kepala eksekutif badan intelijen dan keamanan nasional yang baru (Rekomendasi 2) untuk memasukkan nasihat mengenai Prioritas Keamanan dan Intelijen Nasional dan dalam laporan tahunan mengenai beberapa ancaman (Rekomendasi 17), ringkasan dari saran yang diberikan pada tahun sebelumnya oleh Penasihat Kelompok anti-terorisme (Rekomendasi 7) dan tindakan apa yang telah diambil sebagai tanggapan atas saran tersebut.
9. **Mengarahkan** kepala eksekutif badan intelijen dan keamanan nasional yang baru (Rekomendasi 2), dan untuk sementara waktu Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, untuk meningkatkan praktek berbagi informasi intelijen dan keamanan, termasuk:
  - a) mendorong perubahan pendekatan terhadap prinsip “perlu tahu” di seluruh badan sektor Publik yang terkait, dengan perhatian khusus diberikan kepada pemerintah daerah termasuk struktur manajemen darurat di tingkat lokal dan regional, untuk memastikan hal itu memungkinkan daripada membatasi pembagian informasi; dan
  - b) mengawasi implementasi, dalam enam bulan, rekomendasi pada tahun 2018 *Tinjauan Sistem Klasifikasi Keamanan Selandia Baru*:
    - i) memperluas prinsip-prinsip sistem klasifikasi untuk menetapkan bahwa tidak ada informasi yang bisa tetap diklasifikasikan tanpa batas waktu, jika ada keraguan mengenai tingkat klasifikasi, informasi diklasifikasikan di tingkat yang lebih rendah;

- ii) merevisi dan memperkuat bimbingan badan sektor Publik dan mengembangkan pelatihan;
- iii) mengadopsi pendekatan yang berbasis topik untuk deklasifikasi sistematis dari catatan sejarah; dan
- iv) mengembangkan indikator fungsi dan kinerja sistem klasifikasi.

**10. Mengubah** Undang-Undang Intelijen dan Keamanan 2017 sehubungan dengan perjanjian akses langsung, untuk meminta badan intelijen dan keamanan nasional yang baru, dan untuk sementara waktu Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, untuk secara teratur melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan terorisme di pembentukan dan implementasinya.

**11. Mengarahkan** Kepala eksekutif lembaga sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme untuk mempertimbangkan apakah jumlah karyawan yang memiliki izin keamanan sudah sesuai dan memastikan bahwa staf tersebut memiliki akses yang tepat untuk dapat meninjau materi sesuai kebutuhan ke fasilitas, serta manajemen informasi dan sistem teknologi.

**12. Mengembangkan** dan mempromosikan sistem pelaporan yang memudahkan anggota masyarakat untuk mengaksesnya dan aman dalam melaporkan mengenai perilaku atau insiden ke satu titik kontak dalam pemerintahan.

**13. Mengembangkan** dan mempublikasikan indikator dan faktor risiko yang menggambarkan perilaku khusus publik yang mungkin menunjukkan potensi seseorang untuk terlibat dalam kekerasan ekstrimisme dan terorisme dan memperbaruinya secara teratur saat cakupan ancaman berkembang.

**14. Menetapkan atau membangun** program untuk mendanai penelitian independen khusus Selandia Baru mengenai penyebab, dan tindakan untuk mencegah, kekerasan ekstrimisme dan terorisme dengan ketentuan berikut:

- a) badan intelijen dan keamanan nasional (Rekomendasi 2) harus diberikan alokasi tahunan untuk pendanaan penelitian;
- b) Prioritas penelitian dan penerima hibah harus dipilih oleh sebuah panel yang terdiri atas pejabat dari badan intelijen dan keamanan nasional yang baru (Rekomendasi 2) dan perwakilan dari Kelompok Penasihat untuk penanggulangan terorisme (Rekomendasi 7), dengan perwakilan dari Kelompok Penasihat yang menjadi mayoritas pemilihan panel tersebut; dan
- c) penerima hibah harus didorong untuk mempublikasikan dan mempresentasikan hasil penelitian mereka di hui tahunan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan ekstrimisme dan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi ancaman kekerasan ekstrimisme dan terorisme saat ini dan mulai berkembang (Rekomendasi 16).

**15. Menciptakan peluang** untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai ekstrimisme dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi ancaman ekstrimisme dan terorisme kekerasan saat ini dan mulai bermunculan di Selandia Baru, yang pada awalnya dipimpin oleh Menteri Keamanan dan Intelijen Nasional, dan termasuk diskusi publik yang terus berlangsung dalam:

- a) sifat upaya kontra-terorisme Selandia Baru, termasuk risiko dan ancaman saat ini dan bagaimana badan sektor Publik melindungi warga Selandia Baru dari ancaman dan risiko terorisme;
- b) siapa yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme dan perannya, mengakui bahwa masyarakat, masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta adalah bagian dari upaya penanggulangan terorisme, termasuk, dan tidak terbatas sebagai sumber informasi penting;
- c) kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara privasi individu dan keselamatan individu, komunitas dan untuk memahami izin sosial bagi badan sektor Publik untuk ikut terlibat dalam kontra-terorisme dan perlawanan kegiatan kekerasan ekstrimisme;
- d) mendukung publik untuk memahami cara menanggapi ketika mereka mengenali perilaku dan insiden terkait yang mungkin menunjukkan potensi seseorang untuk terlibat dalam kekerasan ekstrimisme dan terorisme; dan
- e) bagaimana kepaduan sosial, inklusi sosial, dan keragaman berkontribusi pada masyarakat yang efektif.

**16. Mengarahkan** kepala eksekutif dari badan intelijen dan keamanan nasional yang baru (Rekomendasi 2) untuk menyelenggarakan hui tahunan, untuk mempertemukan badan-badan pemerintah pusat dan daerah yang terkait, masyarakat, masyarakat sipil, sektor swasta dan peneliti (Rekomendasi 14) dalam menciptakan peluang yang bertujuan untuk membangun hubungan dan berbagi pemahaman dalam melawan kekerasan ekstrimisme dan terorisme.

**17. Yang diperlukan** dalam undang-undang:

- a) Menteri Keamanan dan Intelijen Nasional untuk mempublikasikan dalam setiap siklus parlemen Prioritas Keamanan dan Intelijen Nasional dan untuk dipertimbangkan dengan merujuk ke Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen;
- a) Menteri yang bertanggung jawab untuk menerbitkan laporan ancaman tahunan; dan
- b) Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen untuk menerima dan mempertimbangkan pengajuan mengenai Prioritas Keamanan dan Intelijen Nasional dan laporan mengenai ancaman tahunan.

**18. Meninjau** semua undang-undang yang terkait dengan upaya kontra-terorisme (termasuk Undang-Undang Pemberantasan Terorisme tahun 2002 dan Undang-undang Intelijen dan Keamanan tahun 2017) untuk memastikan selalu tersedia dalam versi terbaru dan memungkinkan badan-badan sektor Publik untuk beroperasi secara efektif, dengan memprioritaskan pertimbangan pembuatan pendahulu pelanggaran terorisme di Undang-Undang Penindasan Terorisme, tinjauan mendesak atas pengaruh pasal 19 Undang-undang Intelijen dan Keamanan pada penemuan target dan menyetujui serta melaksanakan Konvensi Budapest.

## Rekomendasi untuk meningkatkan sistem perizinan senjata api di Selandia Baru

### Kami merekomendasikan agar Pemerintah:

- 19. Mengarahkan** Kepolisian Selandia Baru (atau entitas terkait lainnya) untuk membuat kebijakan dan standar operasional serta panduan untuk sistem perizinan senjata api yang jelas dan konsisten dengan undang-undang.
- 20. Mengarahkan** Kepolisian Selandia Baru (atau entitas terkait lainnya) untuk memperkenalkan sistem elektronik untuk memproses aplikasi lisensi kepemilikan senjata api.
- 21. Mengarahkan** Kepolisian Selandia Baru (atau entitas terkait lainnya) untuk memastikan staf pemberi lisensi kepemilikan senjata api mendapatkan pelatihan rutin dan melakukan peninjauan berkala atas kualitas pekerjaan mereka.
- 22. Mengarahkan** Kepolisian Selandia Baru (atau entitas terkait lainnya) untuk memperkenalkan indikator kinerja yang berfokus pada penerapan sistem perizinan senjata api yang efektif. Indikator utama harus disertakan:
  - a) pemantauan kinerja rutin staf perizinan senjata api untuk memastikan standar nasional terpenuhi; dan
  - b) kepercayaan publik terhadap sistem perizinan senjata api meningkat (sebagaimana diukur oleh laporan survei kepuasan warga Kepolisian Selandia Baru atau mekanisme serupa).
- 23. Mengarahkan** Kepolisian Selandia Baru (atau entitas terkait lainnya) untuk meminta dua proses baru dalam kasus pemohon yang telah tinggal di luar Selandia Baru selama jangka waktu yang cukup lama dalam sepuluh tahun sebelum pengajuan:
  - a) Pemohon harus diminta untuk menunjukkan pemeriksaan polisi atau sejarah kriminal dari negara di mana mereka sebelumnya tinggal; dan
  - b) Petugas Pemeriksaan Senjata Api harus mewawancarai anggota keluarga atau hubungan dekat lainnya di negara lain dengan menggunakan teknologi jika pemohon tidak memiliki kerabat dekat atau rekan dekat yang tinggal di Selandia Baru.
- 24. Memperkenalkan** wajib lapor kepada Polisi Selandia Baru oleh para profesional kesehatan atas segala cedera yang di sebabkan oleh senjata api.

## Rekomendasi untuk mendukung kebutuhan pemulihan yang berkelanjutan dari whānau, penyintas dan saksi yang terkena dampak

### Kami merekomendasikan agar Pemerintah:

- 25. Mengarahkan** Kementerian Pembangunan Sosial untuk bekerja dengan badan-badan sektor Publik yang terkait termasuk Kepolisian Selandia Baru, Korporasi Kompensasi Kecelakaan, Kementerian Kehakiman, Imigrasi Selandia Baru dan organisasi non-pemerintah untuk memfasilitasi akses yang terkoordinasi demi pemulihan yang berlanjut dari whānau, penyintas dan saksi serangan teroris yang terkena dampak pada tanggal 15 Maret 2019, termasuk menugaskan setiap whānau, penyintas atau saksi perantara tunggal yang akan mengarahkan semua dukungan sektor Publik yang diperlukan atas nama mereka.
- 26. Menyelidiki** pembentukan Collective Impact Network and Board atau mekanisme terkait lainnya yang memungkinkan badan-badan sektor Publik, organisasi non-pemerintah dan whānau, penyintas dan saksi yang terkena dampak untuk menyetujui program kerja tertentu demi memberikan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan kepada whānau, penyintas dan saksi yang terkena dampak.
- 27. Mengarahkan** Departemen Perdana Menteri dan Kabinet dalam bekerja sama dengan badan-badan sektor Publik terkait untuk berdiskusi dengan whānau, para penyintas dan saksi yang terkena dampak dari serangan teroris 15 Maret 2019, jika ada, apa proses keadilan restoratif yang mungkin diinginkan dan bagaimana proses tersebut dapat dirancang dan di sumber dayakan.

## Rekomendasi untuk meningkatkan kepaduan sosial dan tanggapan Selandia Baru terhadap populasi kita yang semakin beragam

### Kami merekomendasikan agar Pemerintah:

- 28. Mengumumkan** bahwa Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan beserta Kementerian Pembangunan Sosial memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mengkoordinasikan pendekatan seluruh pemerintah untuk membangun keterikatan sosial, termasuk inklusi sosial.
- 29. Mengarahkan** Kementerian Pembangunan Sosial untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan masyarakat, masyarakat sipil, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan kerangka strategis kepaduan sosial serta rezim pemantauan dan evaluasi.
- 30. Menyelidiki** ketentuan pilihan pemerintah untuk sebuah badan yang berfokus pada komunitas etnis dan multikulturalisme dan menetapkan bentuk organisasi yang sesuai dengan tujuan yang akan mencakup fungsi yang diharapkan saat ini dari Kantor Komunitas Etnis dan memungkinkan badan sektor Publik baru yang bertanggung jawab berfokus dan melakukan fungsi berikut:
  - a) menasihati pemerintah dan badan sektor Publik mengenai prioritas dan tantangan yang mempengaruhi kesejahteraan komunitas etnis;
  - b) menyusun dan menggunakan data untuk menganalisis, memantau dan mengevaluasi upaya sektor Publik untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas etnis, upaya apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana seharusnya memprioritaskan; dan
  - c) mengembangkan kerangka evaluasi yang memasukkan indikator kinerja yang memeriksa dampak dan efektivitas kebijakan dan program pemerintah terhadap kesejahteraan komunitas etnis.
- 31. Memprioritaskan** pengembangan ukuran dan indikator yang tepat (seperti Kerangka Standar Hidup) dari kepaduan sosial, termasuk inklusi sosial.
- 32. Mewajibkan** lembaga sektor Publik untuk memprioritaskan pengumpulan data mengenai etnis dan demografi agama yang bertujuan untuk mendukung analisis dan nasehat akibat dari perubahan cepat masyarakat Selandia Baru.
- 33. Mengarahkan** kepala eksekutif dari lembaga sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme untuk terus memfokuskan upaya secara signifikan pada peningkatan keragaman tenaga kerja termasuk dalam peran kepemimpinan dan berkonsultasi dengan Kelompok Penasihat untuk kontra-terorisme (Rekomendasi 7).

**34. Mendorong** Komisararis Pelayanan Publik untuk menerbitkan laporan tahunan yang mana:

- a) memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kemajuan sektor Publik atas komitmen *Papa Pounamu* termasuk identifikasi area di mana lembaga sektor Publik tersebut berkinerja baik, area di mana perbaikan dapat dilakukan dan wawasan kritis di semua lembaga mengenai ke mana harus mengarahkan upaya mereka; dan
- b) memprioritaskan terhadap pelaporan kemajuan yang dibuat oleh badan sektor Publik yang terlibat dalam upaya kontra-terorisme.

**35. Mendorong** Komisararis Layanan Umum untuk terus memfokuskan upaya secara signifikan pada peningkatan keragaman tenaga kerja dan menarik beragam bakat untuk peran kepemimpinan layanan Publik di tingkat pertama, kedua dan ketiga.

**36. Berinvestasi** dengan memberi peluang bagi anak muda Selandia Baru untuk belajar mengenai peran, hak dan tanggung jawab mereka dan mengenai nilai keragaman etnis dan agama, inklusivitas, resolusi konflik, kewarganegaraan, dan pengaturan diri.

**37. Menciptakan** peluang untuk berdialog dengan masyarakat umum secara rutin yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab - Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan - bagi semua warga Selandia Baru untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai:

- a) kepaduan sosial termasuk inklusi sosial dan upaya kolektif yang diperlukan untuk mencapai semua ini; dan
- b) penilaian bahwa keragaman budaya, etnis, dan agama dapat berkontribusi terhadap masyarakat yang berfungsi dengan baik.

**38. Mewajibkan** semua keterlibatan komunitas sektor Publik agar sesuai dengan komitmen Kemitraan Pemerintah Terbuka Selandia Baru dan khususnya:

- a) a)mewajibkan lembaga untuk memperjelas mengenai tingkat pengaruh keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan terkait dengan menunjukkan kepada masyarakat di mana keterlibatan tersebut berada di Asosiasi Internasional untuk Partisipasi Publik IAP2 *Spektrum Partisipasi Publik*; dan
- b) mendorong lembaga untuk melakukan lebih banyak tingkat keterlibatan yang “melibatkan” dan “berkolaborasi” sesuai dengan Asosiasi Internasional untuk Partisipasi Publik IAP2 *Spektrum Partisipasi Publik*.

**39. Mengubah** undang-undang untuk membuat pelanggaran bermotivasi kebencian dalam:

- a) Ringkasan Pelanggaran Undang-Undang tahun 1981 yang sesuai dengan pelanggaran perilaku atau bahasa menghina yang ada, penyerangan, kerusakan yang disengaja dan intimidasi; dan
- b) Undang-Undang Kriminal tahun 1961 yang sesuai dengan pelanggaran yang ada berupa penyerangan, pembakaran dan kerusakan yang disengaja.

**40. Mencabut** pasal 131 dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1993 dan memasukkan ketentuan dalam Undang-Undang Kejahatan tahun 1961 untuk pelanggaran yang menghasut ketidak harmonisan ras atau agama, yang berdasarkan maksud untuk membangkitkan, mempertahankan atau menormalkan kebencian, melalui ancaman, tindakan kasar, atau menghina dengan perlindungan karakteristik yang mencakup afiliasi agama.

**41. Mengubah** definisi “tidak pantas” di bagian 3 Undang-Undang Klasifikasi Film, Video, dan Publikasi tahun 1993 untuk memasukkan superioritas rasial, kebencian rasial, dan diskriminasi rasial.

**42. Mengarahkan** Polisi Selandia Baru untuk merubah cara mereka mencatat pengaduan tindakan kriminal untuk menangkap secara sistematis motivasi kebencian karena menyinggung dan melatih staf garis depan dalam:

- a) mengidentifikasi indikator prasangka sehingga mereka dapat mengidentifikasi potensi kejahatan rasial ketika mereka melihat bahwa suatu pelanggaran dimotivasi oleh suatu kebencian;
- b) mengeksplorasi persepsi korban dan saksi sehingga mereka dapat mencatat di mana suatu pelanggaran dianggap memiliki motivasi kebencian; dan
- c) merekam motivasi kebencian tersebut dengan cara yang memfasilitasi penggunaan selanjutnya dari bagian 9 (1) (h) dari Undang-Undang Hukuman tahun 2002.

## Rekomendasi penerapan

### Kami merekomendasikan agar Pemerintah:

- 43. Memastikan** seorang menteri diberi tanggung jawab dan akuntabilitas untuk memimpin dan mengkoordinasikan tanggapan dan pelaksanaan rekomendasi kami dan pengangkatannya agar diumumkan.
- 44. Membentuk** Kelompok Penasihat Pengawasan Implementasi yang:
  - a) termasuk dewan perwakilan masyarakat, masyarakat sipil, pemerintah daerah, sektor swasta, whānau, penyintas dan saksi yang terkena dampak, dan Kelompok Referensi Komunitas Muslim kami;
  - b) memberikan saran kepada menteri yang bertanggung jawab (Rekomendasi 1 dan 43) mengenai desain rencana implementasi pemerintah dan peluncurannya; dan
  - c) menerbitkan nasehatnya agar lebih jelas.

## Catatan akhir

- 1 Laporan ini menyediakan laporan independen mengenai apa yang terjadi menjelang serangan terror pada tanggal 15 Maret 2019, jika ada, apa saja, yang dapat dilakukan untuk menghentikannya dan apa yang sekarang harus dilakukan untuk melindungi warga Selandia Baru dengan lebih baik.
- 2 Dari peristiwa mengerikan serangan teroris tanggal 15 Maret 2019, muncul tanggung jawab untuk merenung dan belajar.
- 3 Tugas pertama pemerintah adalah tetap menjaga keamanan rakyatnya. Namun, keamanan nasional bukan hanya menjadi kewenangan intelijen dan keamanan dan lembaga penegak hukum saja. Banyak badan sektor Publik juga memiliki peran untuk dimainkan. Begitu pula dengan komunitas, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Warga Selandia Baru dapat memainkan peran penting dalam melawan terorisme dan ekstrimisme. Untuk memainkan peran itu, warga Selandia Baru harus diberi tahu mengenai masalah tersebut dan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu.
- 4 Dengan pemikiran ini, kami telah memasukkan dalam laporan kami sejumlah besar materi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Sangat Rahasia atau Rahasia. Kami telah melakukannya untuk menjelaskan bagaimana cara sebenarnya kerja kontra-terorisme Selandia Baru. Ini akan memungkinkan debat di masa depan mendapat informasi yang lebih baik. Kami melihat debat yang terinformasi seperti itu sebagai dasar dari izin sosial dan dengan demikian efektivitas upaya kontra-terorisme.
- 5 Kami menyadari bahwa kami telah menyelesaikan analisis dan laporan kami dalam bayangan pandemi COVID-19. Pandemi telah memengaruhi semua komunitas dan telah menjadi pengingat yang kuat akan perlunya ketahanan komunitas dan infrastruktur sosial. Ini juga menjadi ilustrasi cemerlang mengenai apa yang bisa dicapai ketika masyarakat bertindak secara kolektif untuk kepentingan publik yang lebih luas.
- 6 Hal mendasar bagi kesejahteraan dan keamanan Selandia Baru di masa depan adalah kepaduan sosial. Meskipun kepaduan sosial di Selandia Baru jauh lebih tinggi daripada banyak negara lain. Mempertahankan dan meningkatkan kepaduan sosial merupakan tugas penting bagi pemerintah. Kami yakin bahwa keinginan itu ada. Kami telah menyediakan mekanisme dalam rekomendasi kami untuk mewujudkan keinginan itu.
- 7 Perubahan ini tidak akan mudah, tetapi kami telah meletakkan wero dan kami mendesak Pemerintah untuk mengambil tantangan atau keputusan dan segera bertindak.



